

ANALISIS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (P3) DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diusulkan oleh

HERAWATI

Nomor Stambuk: 105610489414



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

ANALISIS PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (P3) DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR



Skripsi

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makaasar*

HERAWATI

Nomor Stambuk: 105610489414

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

PERSETUJUAN

Judul Proposal Penelitian : Analisis *Public Private Partnership* (P3) dalam
implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota
Makassar

Nama Mahasiswa : Hertawati

Nomor Stambuk : 10561 04888 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si

Pembimbing II



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



Nasrul Haq, S.Sos., MPA

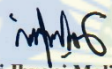
PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar , Nomer : 0012/FSP/A.4-VIII/II/40/2019 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program Studi Ilmu Administrasi Negara di Makassar pada hari Rabu tanggal 28 Februari tahun 2019.

TIM PENILAI

Ketua





Sekretaris


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)
2. Dr. Hj. rulinawaty Kasmad, S.Sos., M.Si
3. Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si
4. Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

)
)
()
()

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Herawati

Nomor Stambuk : 105610489414

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 05 Februari 2019

Yang Menyatakan,



Herawati

ABSTRAK

HERAWATI., Publik Private Partnership (P3) Dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran Dikota Makassar (dibimbing oleh Rulinawaty Kasmad dan Nurbiah Tahir)

Public private patnership merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati bersama, dengan menggunakan sumber daya pihak swasta dengan tetap memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak swasta harus memiliki kemampuan keuangan yang mendiakan untuk membiayai pelaksanaan proyek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis public private partnership (P3) dalam implementasi kebijakan perparkiran di Kota Makassar.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis public private partnership (P3) dalam implementasi kebijakan perparkiran di kota makassar dilihat dari (1) Pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah dalam pengelolaan parkir telah menjalankan tugasnya dengan baik terhadap perparkiran di kota makassar(2)pihak swasta menerima kompensasi dari pemerintah dalam bentuk materi (3)pihak swasta bertanggung jawab atas resiko itu kurang baik karena yang dimana resiko yang di dapat masih ditanggung oleh pihak pemerintah (pd.parkir) (4) Dalam penyediaan fasilitas dimana pihak swasta telah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung perparkiran di kota makassar yang memberikan fasilitas lahan perparkiran disetiap titik yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta.

Kata kunci : Publik Private partnership, implementasi, perparkiran

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah Swt. Yang senantiasa memberikan nikmat kepada seluruh makhluk-Nya. Allah Maha Penyayang dan pengasihi, demikian kata untuk mewakili atas segala karunianya dan nikmat-Nya. Skripsi ini adalah setitik dari sederetan berkah-Nya.

Skripsi ini merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi syarat salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit kendala yang penulis hadapi, Namun, berkat ketekunan dan ketabahan serta uluran tangan dari beberapa pihak utamanya Ridha Allah Swt, maka hambatannya itu dapat diatasi dengan baik sehingga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua Muhammad Amiruddin dan Pinang yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik, dan membiayai penulis dalam proses pencarian ilmu. Demikian pula penulis ucapkan banyak terima kasih kepada keluarga khususnya kakak dan adik penulis yang tak hentinya memberikan motivasi.

Melalui kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan pernyataan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak atas segala bantuannya yang diberikan selama ini, terutama Ibu Dr. Hj. Rulinawaty Kasmad, M.Si selaku Pembimbing I dan ibu Nurbiah Tahir, S.Sos., M. AP selaku pembimbing II yang atas kesediaan meluangkan waktunya dan sesungguhnya dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat; Bapak Dr. H.Abd. Rahman Rahim, SE., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Nasrul Haq, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Drs. Muhammad Tahir, M.Si selaku Penasehat Akademik, Serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Penulis juga mencucapkan banyak terima kasih kepada teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Angkatan 2014 Khususnya kelas B, teman SMA ku Desy Amaliya Ramadani.S.Ap yang selalu membantuku, teman-teman grop keluarga cemara Irma Rifani,mitha arnika,miftahus sa'adah yang senantiasa mensupportku dan membantuku, dan khususnya darmais dan sri wahyuni yang sabar membantuku Makasih atas kebersamaan dan motivasi,saran, dan bantuannya kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritikan yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 05 Februari 2018

penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengajuan Judul Skripsi.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	vii
Datar Tabel.....	xi
Daftar Gambar.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Paradigma Administrasi Public OPA, NPM dan NPS	7
1. Paradigma Old Public Administration (OPA)	7
2. Paradigma New Public Management (NPM)	10
3. Paradigma New Public Service (NPS)	12
B. Konsep Good Governance	14
1. Asas Good Governance	16
2. Tujuan Governance	18
C. Konsep Public Private Patnership (P3)	18
D. Konsep Parkir	21
E. Kerangka Pikir	23
F. Fokus Penelitian.....	24
G. Deskripsi Fokus Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	26
B. Jenis dan Tipe Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Informan Penelitian	27

E. Teknik Pengumpulan Data	28
F. Teknik Analisis Data	29
G. Pengabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PENGABSAHAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	32
1. profil Kota Makassar	32
2. Profil Pd.Parkir Makassar Raya	33
3. Profil PT.ISS CABANG MAKASSAR	36
B. Analisis Public Private Partnership (P3)	39
1. Pihak swasta menjalankan fungsi Pemerintah	40
2. Pihak Swasta Menerima Kompensasi	48
3. Pihak Swasta Bertanggung Jawab Atas Resiko	51
4. fasilitas umum, tanah atau sumber daya lain	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

Gambar : 4.1. Struktur Organisasi PD Parkir Makassar



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian ilmu administrasi publik yang berkembang pada pergeseran paradigma administrasi publik sampai kepada pespektif *new public management* (NPM). Dimana negara-negara maju yang telah lama diparkirkan. Perspektif mencoba mengubah pola pandang yang menyelenggarakan pemerintah sebelum berorientasi *government* menjadi *governance*. Dalam *governance* terdapat tiga aktor utama yakni *state*, *private sectors*, dan *society* (UNPD, 1997).

Pemerintah saat ini dituntut untuk memberikan atau menyediakan pelayanan publik, dalam penyelenggaraan pemerintah membentuk paret dari pihak swasta untuk bekerjasama untuk itu dibutuhkan sebuah kemitraan yang lebih dikenal sebagai *public private partnerships* (P3). *Public private partnership* (P3) merupakan perjanjian jangka panjang antara pemerintah dan pusat maupun daerah dengan mitra swasta perjanjian ini disebut jangka panjang karena menyertakan kontrak kerja dengan pihak swasta (biasanya lebih dari 20thn) antara pemerintah. Melalui P3 segala sumber daya seperti tenaga ahli dan aset berasal dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta), yang bekerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan pada sektor pelayanan publik (Osborne, 2002)

Public Private partnership di indonesia dimulai sejak dikeluarkan PP RI No. 67 Tahun 2005. Tentang krjasama pemerintah dengan badan usahaha dalam penyediaan infrastruktur dan kemudian kebijakan ini berubah sesuai dengan tuntutan zaman ini.

Public private patnership merupakan kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta, dalam hal penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati bersama, dengan menggunakan sumber daya pihak swasta dengan tetap memperhatikan pembagian resiko diantara para pihak swasta harus memiliki kemampuan keuangan yang mendiakan untuk membiayai pelaksanaan proyek.

Public private patnership memiliki 4 siklus atau 4 tahap” yaitu perencanaan, persiapan proyek, transaksi dan manajemen kontrak. Semua proses ini melibatkan kedu belapihak baik pemerintah maupun pihak swasta dalam pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati berasama. Pelaksanaan program *public private partnership* atau lebih dikenal kemitraan. (William J,2017) .

Penelitian tentang *Public private partnership* bervariasi tergantung kontrak yang disepakati. Penelitian antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan. Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal. (Rukmana, 2015).

Masalah parkir masih menjadi Masalah yang menjadi perhatian pihak pemerintah. Sebagai upaya dilakukan pemerintah kota Makassar dan PD.Parkir Makassar Raya untuk membenahi perparkiran. Salah satunya dengan mengadakan motor penertiban parkir. Selain permasalahan parkir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui parkir juga masih minim, bahkan sektor parkir belum memberikan kontribusi yang memadai. Salah satu penyebabnya adalah kian menjamurnya

parkir liar dengan juru parkir yang liar pula. Mereka menarik retribusi parkir dari para pengendara tapi tidak menyetorkannya ke Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Sebagai *leading* sektor. Belum efektifnya larangan parkir di lima ruas jalan yang banyak menimbulkan kemacetan, juga ditanggapi anggota DPRD Kota Makassar. P3 di Indonesia dimulai sejak dikeluarkan PP RI No. 67 Tahun 2005. Tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan kemudian kebijakan ini berubah sesuai dengan tuntutan zaman hal ini bisa di lihat pada PP RI No. 66 Tahun 2013.

Kemitraan juga dilakukan oleh perusahaan daerah (PD Parkir Makassar). Dengan memberikan izin kepada pihak swasta untuk membuka lahan parkir dan menyiapkan infrastruktur, seperti penyediaan perparkiran dipusat-pusat perkotaan (Mall). Hal ini mendapatkan keuntungan di kedua belapihak, misalnya parkir makassar mendapatkan PAD sebesar Rp. 728.771,550. Tahun 2014 yang tentu dianggap tidak mencapai target yang diberikan, oleh penelitian ini juga merujuk bahwa masalah perparkiran perlu melibatkan aktor swasta agar tidak terjadi penghindaran pendataan registrasi wajib pajak dan perparkiran bisa mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kota makassar.

Pemerintah perlu menjalin mitra kerja dengan perusahaan lain dalam mengelola perparkiran. Pembukaan lahan baru oleh pemerintah dianggap sebagai peluang dalam percepatan pembangunan apabila pemerintah mampu menggandeng mitra swasta dalam menyediakan infrastruktur. (Bahar, 2017)

Hal ini menunjukkan adanya multi intepretasi atas regulasi berlaku yang menyebabkan terjadinya *clash* antar instansi 3. Perusahaan Daerah (PD Parkir)

Makassar Raya berada pada posisi kuadrat I, yang berarti memiliki kesempatan dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini ialah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (Growth Berbagi kemitraan yang dibentuk oleh pihak pemerintah dan swasta menunjukkan lebih banyak menguntungkan pihak swasta, kemitraan belum sepenuhnya mampu menunjukkan keberpihakan pada pelayanan publik. Hal ini ditunjukkan dalam penelitian (Rukmana,2015) belum sepenuhnya berjalan dengan lancar memaksimalkan sesuai dengan perjanjian/kontrak.

*Dari pembahasan diatas maka penelitian ini mencoba membahas strategi pengembangan usaha dengan menggunakan teori William J (2005) dimana: (a) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung, (c) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi dan, (d) fasilitas umum, tanah atau sumber daya lain dapat ditransfer atau tersedia untuk pesta pribadi. Berdasarkan hal diatas maka penelitian ini berjudul “ Analisis *Public Private Partnership* (P3) dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar”.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam *Public Private Partnership* antara (PT.

ISS) *International Space Station* Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar?

2. Bagaimana pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung dalam *Public Private Partnership* antara (PT. ISS) *International Space Station* Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar?
3. Bagaimana pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi dalam *Public Private Partnership* antara (PT. ISS) *International Space Station* Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar?
4. Bagaimana fasilitas umum, tanah atau sumber daya dalam *Public Private Partnership* antara (PT. ISS) *International Space Station* Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaiman pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam *Public Private Partnership* antara PT. ISS Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar
2. Untuk mengetahui bagaiman pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung

3. Untuk mengetahui bagaimana pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi dalam *Public Private Partnership* antara (PT. ISS) Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar
4. Untuk mengetahui bagaimana fasilitas umum, tanah atau sumber daya lain dapat ditransfer atau tersedia untuk pesta pribadi dalam *Public Private Partnership* antara (PT. ISS) *International Space Station* Indonesia dengan Perusahaan Daerah (PD Parkir) Kota Makassar

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dan menjadi bahan masukan bagi penelitian yang berkaitan dengan bidang penelitian yang sama.
2. Praktis. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak Perusahaan Daerah (PD Parkir Makassar Raya dan *International Space Station* (PT.ISS) Cabang Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Paradigma Administrasi Publik

1. Paradigma Old Public Administration (OPA)

Paradigma ini merupakan perkembangan pada awal kelahiran ilmu administrasi negara. Tokoh paradigma ini adalah antara lain adalah pelopor berdirinya ilmu administrasi negara Woodrow Wilson yang merupakan presiden AS pada saat itu dengan karyanya "*The Study of Administration*"(1887) serta F.W. Taylor dengan bukunya "*Principles of Scientific Management*".

Dalam bukunya "*The Study of Administration*", Wilson berpendapat bahwa problem utama yang dihadapi pemerintah eksekutif adalah rendahnya kapasitas administrasi. Untuk mengembangkan birokrasi pemerintah yang efektif dan efisien, diperlukan pembaharuan administrasi pemerintahan dengan jalan meningkatkan profesionalisme manajemen administrasi negara. Untuk itu, diperlukan ilmu yang diarahkan untuk melakukan reformasi birokrasi dengan mencetak aparatur publik yang profesional dan non-partisan. Karena itu, tema dominan dari pemikiran Wilson adalah aparat atau birokrasi yang netral dari politik. Administrasi negara harus didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari hiruk pikuk kepentingan politik. Inilah yang dikenal sebagai konsep dikotomi politik dan administrasi. Administrasi negara merupakan pelaksanaan hukum publik secara detail dan

terperinci, karena itu menjadi bidangnya birokrat teknis. Sedang politik menjadi bidangnya politisi.

Ide-ide yang berkembang pada tahun 1900-an memperkuat paradigma dikotomi politik dan administrasi, seperti karya Frank Goodnow "*Politic and Administration*". Karya fenomenal lainnya adalah tulisan Frederick W. Taylor "*Principles of Scientific Management* (1911). Taylor adalah pakar manajemen ilmiah yang mengembangkan pendekatan baru dalam manajemen pabrik di sector swasta – *Time and Motion Study*. Metode ini menyebutkan ada cara terbaik untuk melaksanakan tugas tertentu. Manajemen ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan output dengan menemukan metode produksi yang paling cepat, efisien, dan paling tidak melelahkan. Jika ada cara terbaik untuk meningkatkan produktivitas di sector industri, tentunya ada juga cara sama untuk organisasi public. Wilson berpendapat pada hakekatnya bidang administrasi adalah bidang bisnis sehingga metode yang berhasil di dunia bisnis dapat juga diterapkan untuk manajemen sektor publik.

Teori penting lain yang berkembang adalah analisis birokrasi dari Max Weber. Weber mengemukakan ciri-ciri struktur birokrasi yang meliputi hirarki kewenangan, seleksi dan promosi berdasarkan merit system, aturan dan regulasi yang merumuskan prosedur dan tanggungjawab kantor, dan sebagainya. Karakteristik ini disebut sebagai bentuk kewenangan yang legal rasional yang menjadi dasar birokrasi modern.

Ide atau prinsip dasar dari Administrasi Negara Lama menurut Dernhart dan Dernhart 2003 (Kasmad:2018:216) adalah :

1. Fokus pemerintah pada pelayanan publik secara langsung melalui badan-badan pemerintah.
2. Kebijakan publik dan administrasi menyangkut perumusan dan implementasi kebijakan dengan penentuan tujuan yang dirumuskan secara politis dan tunggal.
3. Administrasi publik mempunyai peranan yang terbatas dalam pembuatan kebijakan dan pemerintahan, administrasi publik lebih banyak dibebani dengan fungsi implementasi kebijakan publik
4. Pemberian pelayanan publik harus dilaksanakan oleh administrator yang bertanggungjawab kepada "*elected official*" (pejabat/birokrat politik) dan memiliki diskresi yang terbatas dalam menjalankan tugasnya.
5. Administrasi negara bertanggungjawab secara demokratis kepada pejabat politik
6. Program publik dilaksanakan melalui organisasi hirarkis, dengan manajer yang menjalankan kontrol dari puncak organisasi
7. Nilai utama organisasi publik adalah efisiensi dan rasionalitas
8. Organisasi publik beroperasi sebagai sistem tertutup, sehingga partisipasi warga negara terbatas
9. Peranan administrator publik dirumuskan sebagai fungsi POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*)

2. Paradigma New Public Management (NPM)

Paradigma *New Public Management* (NPM) muncul tahun 1980an dan menguat tahun 1990an sampai sekarang. Prinsip dasar paradigma (NPM) Paradigma *New Public Management* adalah menjalankan administrasi negara sebagaimana menggerakkan sektor bisnis (*run government like a business atau market as solution to the ills in public sector*). Strategi ini perlu dijalankan agar birokrasi model lama – yang lamban, kaku dan birokratis – siap menjawab tantangan era globalisasi . Model pemikiran semacam (NPM) Paradigma *New Public Management* juga dikemukakan oleh David Osborne dan Gaebler (1992) dalam konsep ”*Reinventing Government*”.Osborne dan Gaebler menyarankan agar menyuntikkan semangat wirausaha ke dalam sistem administrasi negara. Birokrasi publik harus lebih menggunakan cara ”*steering*” (mengarahkan) daripada ”*rowing*” (mengayuh). Dengan cara ”*steering*”, pemerintah tidak langsung bekerja memberikan pelayanan publik, melainkan sedapat mungkin menyerahkan ke masyarakat. Peran negara lebih sebagai fasilitator atau supervisor penyelenggaraan urusan publik. Model birokrasi yang hirarkis-formalistis menjadi tidak lagi relevan untuk menjawab problem publik di era global.

Ide atau prinsip dasar paradigma NPM menurut Dernhart dan Dernhart 2003 (Kasmad:2018:107) adalah :Mencoba menggunakan pendekatan bisnis di sektor publik

1. Penggunaan terminologi dan mekanisme pasar , dimana hubungan antara organisasi publik dan customer dipahami sebagaimana transaksi yang terjadi di pasar.

2. Administrator publik ditantang untuk dapat menemukan atau mengembangkan cara baru yang inovatif untuk mencapai hasil atau memprivatisasi fungsi-fungsi yang sebelumnya dijalankan pemerintah
3. ”*steer not row*” artinya birokrat/PNS tidak mesti menjalankan sendiri tugas pelayanan publik, apabila dimungkinkan fungsi itu dapat dilimpahkan ke pihak lain melalui sistem kontrak atau swastanisasi.
4. (NPM) *New Public Management* menekankan akuntabilitas pada *customer* dan kinerja yang tinggi, restrukturisasi birokrasi, perumusan kembali misi organisasi, perampingan prosedur, dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan.

Paradigma (NPM) *New Public Management* memiliki konsep yang terkait dengan manajemen kinerja sektor publik, yang mana pengukuran kinerja merupakan salah satu dari prinsip-prinsipnya. Paradigma *New Public Management* (NPM) mengacu kepada sekelompok ide dan praktik kontemporer untuk menggunakan pendekatan-pendekatan dalam sektor privat (bisnis) pada organisasi sektor publik. Pemerintahan yang kaku dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh OPA (*old public administrasi*) harus diganti dengan pemerintahan yang berjiwa wirausaha. (NPM) *New Public Management* menganjurkan pelepasan fungsi-fungsi pemerintah kepada sektor swasta.I.

3. Paradigma New Public Service (NPS)

Paradigma *New Public Service* (NPS) merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V.Dernhart dan Robert B.Dernhart berjudul

“The New Public Service : *Serving, not Steering*” terbit tahun 2003. Paradigma NPS dimaksudkan untuk meng”counter” paradigma administrasi yang menjadi arus utama (mainstream) saat ini yakni paradigma *New Public Management* yang berprinsip “*run government like a business*” atau “*market as solution to the ills in public sector*”. Menurut paradigma (NPS) *New Public Service* , menjalankan administrasi pemerintahan tidaklah sama dengan organisasi bisnis. Administrasi negara harus digerakkan sebagaimana menggerakkan pemerintahan yang demokratis. Misi organisasi publik tidak sekedar memuaskan pengguna jasa (*customer*) tapi juga menyediakan pelayanan barang dan jasa sebagai pemenuhan hak dan kewajiban publik.

Paradigma (NPS) *New Public Service* memperlakukan publik pengguna layanan publik sebagai warga negara (*citizen*) bukan sebagai pelanggan (*customer*). Administrasi negara tidak sekedar bagaimana memuaskan pelanggan tapi juga bagaimana memberikan hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik. Cara pandang paradigma (NPS) *New Public Service* ini ,menurut Dernhart (2008), diilhami oleh (1) teori politik demokrasi terutama yang berkaitan dengan relasi warga negara (*citizens*) dengan pemerintah, dan (2) pendekatan humanistik dalam teori organisasi dan manajemen. Paradigma (NPS) *New Public Service* memandang penting keterlibatan banyak aktor dalam penyelenggaraan urusan publik. Dalam administrasi publik apa yang dimaksud dengan kepentingan publik dan bagaimana kepentingan publik diwujudkan tidak hanya tergantung pada lembaga negara. Kepentingan publik harus dirumuskan dan

diimplementasikan oleh semua aktor baik negara, bisnis, maupun masyarakat sipil. Pandangan semacam ini yang menjadikan paradigma (NPS) *New Public Service* disebut juga sebagai paradigma *Governance*. Teori *Governance* berpandangan bahwa negara atau pemerintah di era global tidak lagi diyakini sebagai satu-satunya institusi atau aktor yang mampu secara efisien, ekonomis dan adil menyediakan berbagai bentuk pelayanan publik sehingga paradigma *Governance* memandang penting kemitraan (*partnership*) dan jaringan (*networking*) antar banyak *stakeholders* dalam penyelenggaraan urusan publik.

Para ahli kewarganegaraan, komunitas dan masyarakat sipil, humanisme organisasional dan adminitrasi publik baru serta post-modernisme membantu menetapkan ide-ide Layanan Publik Baru, yaitu :

1. Melayani penduduk, bukan konsumen (Lebih memfokuskan pada hubungan saling percaya)
2. Mencari kepentingan publik
3. Menilai penduduk lebih dari kewirausahaan
4. Berfikir strategis, bertindak demokratis
5. Menyadari akuntabilitas bahwa itu tidak sederhana
6. Melayani bukan menyetir
7. Menilai orang, bukan hanya produktivitasnya

B. Konsep Good Governance

Good Governance adalah tata laksana pemerintahan yang baik. Secara sederhana definisi dan pengertian *good governance* adalah seperangkat proses yang diberlakukan dalam organisasi baik swasta

maupun negeri untuk menentukan keputusan. Pengertian *good governance* ini sangat beragam dan para ahli pun berbeda dalam merumuskan definisi *good governance* ini. Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority* atau memerintah dengan kewenangan.

Berdasarkan PP No. 101 Tahun 2000 pengertian *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good Governance* sendiri bisa diartikan sebagai suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran kesalahan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif untuk menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Good Governance di Indonesia sendirimulai didengungkan dan terjadi di era reformasi tahun 1998. Pada era tersebut terjadi perombakan sistem pemerintahan besar besaran karena tuntunan proses demokrasi yang bersih. Maka *good governance* adalah salah satu alat yang tepat dan

akhirnya diterapkan saat itu. Meski begitu, penerapan good governance di Indonesia sendiri belumlah maksimal hingga kini dan masih belum sesuai dengan cita cita reformasi. Hal ini karena masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*.

Good Governance menurut pengertian *World Bank* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal *and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selain itu Bank dunia juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif di antara negara, sector dan masyarakat.

Menurut LAN dan BPKP *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan Negara, oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan *Public goods dan services*. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya “*alignment* “ (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi. Agar pemerintahan yang baik menjadi realitas dan berhasil diwujudkan, diperlukan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat.

Kashi Nisjar (1997), mengemukakan bahwa secara umum good governance mengandung unsur utama yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, keterbukaan dan aturan hukum. Kooiman (1993) berarti

merupakan serangkaian kegiatan (proses) interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Syakhroza (2003) menjelaskan arti *good governance* sebagai tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara apakah dilihat dari konteks mekanisme internal organisasi ataupun mekanisme external organisasi.

1. Asas Good Governance

Berikut ini beberapa asas good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang perlu diketahui :

- a. Asas Kepastian Hukum, Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.
- c. Asas Kepentingan Umum, Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan, Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif

tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

- e. Asas Proporsionalitas, Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Negara.
- f. Asas Profesionalitas, Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas Akuntabilitas, Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tujuan Governance

Dengan dibentuknya konteks *governance* maka peran yang diemban pemerintah semakin banyak yang bisa dijalankan. Peran yang dimiliki oleh pemerintah selain peran strategi dimasa yang akan datang menurut Wibowo (2004:21) Adalah :

- a. Menciptakan situasi ekonomi yang kondusif bagi pembangunan manusia berkelanjutan,
- b. Melindungi warga negara yang berada dalam posisi lemah dan rentan,
- c. Meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintah,

- d. Memberdayakan masyarakat dan melakukan demokratisasi sistem politik,
- e. Desentralisasi sistem administrasi,
- f. Meningkatkan atau mengurangi kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin,
- g. Memperkuat integritas sosial dan keragaman budaya,
- h. Melindungi lingkungan,
- i. Mempromosikan kesejahteraan.

C. Konsep Public Privat Partnership (P3)

Manfaat dari partnership antara swasta dan pemerintah ialah pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan pihak swasta dalam melaksanakan parkir di Kota Makassar. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah karena pemerintah lemah atau kurang mampu dalam ketersediaan *skill* sarana dan prasarana dan finansial sehingga perlu melibatkan pihak swasta.

Keterlibatan pihak swasta yang mampu menyediakan keuangan dan tenaga ahli setidaknya membantu fungsi pemerintah sebagai motor pelaksana pembangunan. Selain itu melalui PPP juga menciptakan sistem pemerintahan yang bersih karena dalam hal ini pemerintah juga bisa melaksanakan fungsi kontrol terhadap sektor swasta yang terlibat. Namun perlu diingat, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan sektor swasta haruslah memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan harus diikat

dalam suatu kontrak untuk jangka waktu tertentu. Disinilah peran dan fungsi pemerintah untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan diperlukan. Sebagaimana kita sadari bahwa sudah jelas dengan adanya keterlibatan pihak swasta adalah untuk meraih keuntungan sebagai konsekuensi dalam pembangunan. Namun keuntungan yang didapat oleh pihak swasta ini sudah seharusnya tidak merugikan pembangunan. Oleh karena itu perlunya adanya pengawasan dari pemerintah dan pembatasan waktu.

Crus (2013) Perjanjian kemitraan swasta publik telah muncul di seluruh dunia sebagai tanggapan terhadap defisit infrastruktur dan kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. tidak ada definisi KPS yang tidak jelas dan jelas, tetapi mungkin untuk meringkasnya adalah model pengadaan untuk penyediaan infrastruktur dan / atau layanan. sektor publik dan swasta terlibat dalam hubungan kontraktual, atau institusional, untuk memastikan bahwa infrastruktur dan / atau layanan tertentu tersedia bagi warga negara. ini adalah salah satu fitur utama P3. mereka umumnya dikembangkan untuk misi antre publik: jalan, kereta api, pelabuhan, airports, air dan air limbah, limbah energi, kesehatan, keamanan dan kesehatan, untuk memberikan beberapa contoh. pemerintah, wali utama untuk penyediaan layanan ini, mempercayakan sektor swasta dengan tanggung jawab untuk merancang, membiayai, membangun dan mengoperasikan infrastruktur dan / atau layanan. ada beberapa model, seperti yang akan dijelaskan nanti, di mana tidak semua tanggung jawab

ditugaskan ke sektor publik. Pengaturan KPS telah menjadi solusi untuk mengatasi kendala anggaran publik sementara memungkinkan penggunaan keahlian sektor swasta dan tahu bagaimana mengelak dan mengelola layanan publik. Meskipun pendorong utama untuk mengembangkan KPBU harus lebih efisien dalam penggunaan uang publik, faktanya bahwa sebagian besar proklamasi PPP dikembangkan sebagai jalan pintas ke kendala anggaran publik. dalam jangka menengah dan panjang, ini telah menimbulkan beberapa masalah, khususnya melalui renegotiasi, yang telah meningkatkan beban keuangan dengan model pengadaan ini.

Meskipun demikian, proyek (P3) dikembangkan pada 1990 di *United Kingdom* (Inggris). memang, ini benar mengingat struktur rumit keuangan proyek saat ini. namun, sebagai kesepakatan dari publik dan sektor swasta, di mana yang terakhir mengasumsikan tanggung jawab biasanya ditempatkan di tingkat pemerintah, jauh lebih tua. adalah mungkin untuk menemukan "model konsesi" di abad ke lima belas, di mana pemberi (raja) akan mengizinkan para navigator untuk mengambil alih wilayah yang tidak dikenal dengan imbalan sewa.

Model ini telah digunakan secara luas sejak tahun 1990, cemara di negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, Spanyol atau Spanyol, antara lain, dan baru-baru ini, di seluruh Amerika Selatan, Asia, Afrika dan Amerika Serikat (USA). mengapa model ini mendapatkan momentum.

Model untuk keterlibatan pribadi model pengadaan tradisional mengambil dari kontrak kerja publik. sektor swasta memberikan layanan

yang dirancang sebelumnya yang diperintahkan oleh agen kontrak (entitas publik), dan tanggung jawabnya yang unik terkait dengan standar kualitas (astabilish untuk layanan itu sendiri). hubungan antara kedua agen adalah transaksi agen outsourcing. kerumitan model-model tradisional ini mungkin berkurang ketika ada kontrak bantuan teknis atau sub-kontrak, di mana mitra swasta bertanggung jawab atas penyediaan layanan pasti yang merupakan bagian dari sistem besar, misalnya, layanan pembersihan di fasilitas perawatan kesehatan. pada titik ini, keterlibatan yang lebih dalam dari agen swasta masuk ke dalam domain (P3).

Kontrak manajemen, sewa atau konsesi dari (P3) lebih kompleks daripada model pengadaan tradisional (gomez-ibanez 2003). dalam model pertama, mitra swasta menerima biaya manajemen, umumnya diindeks ke target kinerja, untuk menjalankan layanan atas nama agen publik. dalam model kedua, yang dikenal sebagai leasing, agen swasta, yang mengelola dan menjalankan layanan, membayar biaya sewa guna menggunakan infrastruktur publik dan menanggung risiko bisnis, tetapi agen tersebut tidak bertanggung jawab atas investasi. di Uni Eropa (UE), konsesi dikategorikan ke dalam konsesi pekerjaan umum dan konsesi pelayanan publik. perbedaan antara mereka adalah bahwa di bekas bagian terbesar dari bisnis menyangkut pekerjaan konstruksi, dan dalam hal yang lebih buruk, ia menganggap penyediaan layanan publik. akhirnya, ada juga model konsesi yang dibangun dalam berbagai bentuk (*built-operate-transfer*, BOT; *build-own-operate*, BOO; dll).

Public Private Partnersip William J (2005) di mana: (a) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, (b) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi, secara langsung atau tidak langsung, (c) pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari melakukan fungsi dan, (d) fasilitas umum, tanah atau sumber daya lain dapat ditransfer atau tersedia untuk pesta pribadi.

D. Konsep Parkir

Menurut pedoman teknis penyelenggara fasilitas parkir, direktorat jenderal perhubungan darat (1996) yang menyatakan bahwa parkir adalah suatu keadaan yang tidak bergerak dari suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Parkir menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan Joko Murwono (1996) berpendapat, parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara dan pengemudi meninggalkan kendaraannya masuk kepenitipan menaikan dan menurunkan orang atau barang.

Fasilitas parkir merupakan suatu bagian yang penting dalam sistem transportasi darat. Kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor maupun truk adalah sangat penting. Kebutuhan tempat parkir tersebut tergantung dari bentuk dan karakteristik masing-masing kendaraan dengan desain dan lokasi parkir. Permasalahan parkir pada dasarnya terjadi apabila jumlah kebutuhan parkir lebih besar dari pada kapasitas parkir, sehingga dapat

mengganggu lalu lintas disekitar lokasi parkir. Jenis-jenis parkir :

Berdasarkan penetapan

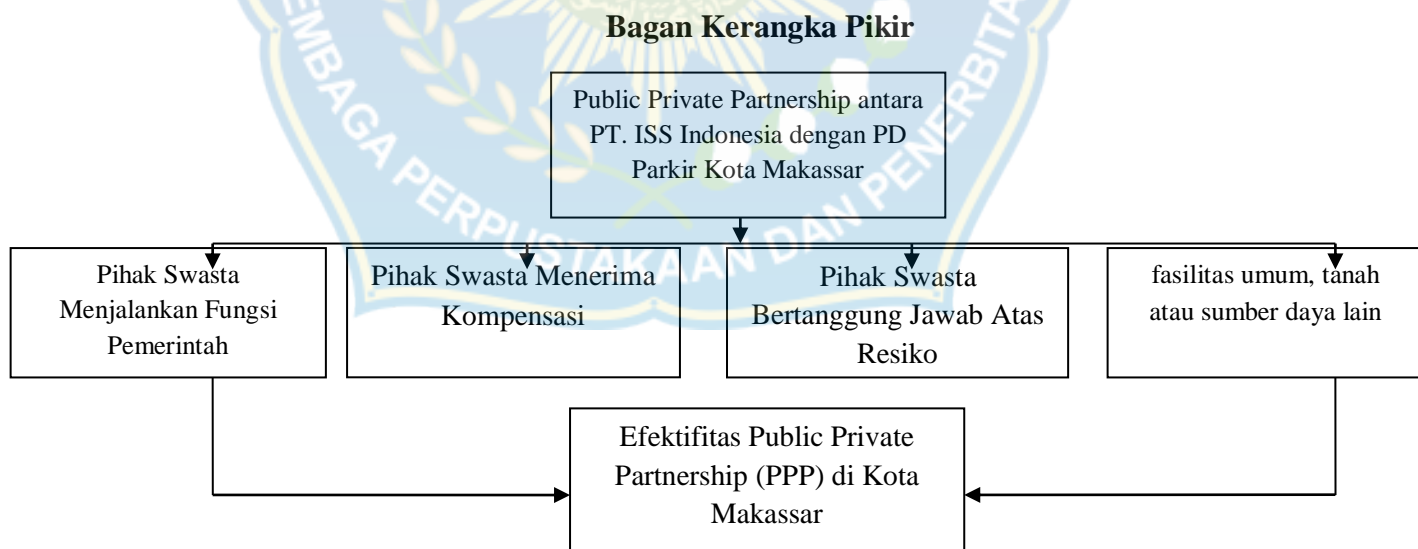
1. Parkir di badan jalan (*on street parking*) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di badan jalan adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai ruang parkirnya.
2. Parkir diluar badan jalan (*off street parking*) Yang dimaksud dengan fasilitas parkir di lokasi parkir adalah tata guna lahan yang khusus disediakan sebagai ruang parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk atau pintu pelayanan keluar sebagai tempat pengambil atau menyerahkan karcis sehingga dapat mengetahui secara pasti jumlah kendaraan dan jangka waktu kendaraan parkir yang parkir. Menurut pedoman teknis penyelenggaraan fasilitas parkir Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (1996), untuk mendesaing suatu pelataran parkir harus diperhatikan beberapa criteria penting, yaitu: rencana tata guna lahan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan, kemudahan bagi pengguna, tersedianya tata guna tanah serta letak jalan akses dan daerah yang dilayani.

E. Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini dimasukka untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang digunakan peneliti sebagai landasan pemahaman tentang penelitian yang dilakukan. Masalah parkir di Kota Makassar masih menjadi masalah yang sangat serius sehingga menjadi

perhatian pihak pemerintah dalam mengatasi masalah perparkiran di kota Makassar dengan cara pemerintah berusaha untuk melakukan pembenahan terhadap perparkiran di Kota Makassar. Dalam mengatasi masalah perparkiran di kota Makassar sangat di butuhkan kemitraan dengan berbagai pihak, dimana model kemitraan terdiri dari 4 yaitu 1) Pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah, 2) Pihak swasta menerima kompensasi, 3) Pihak swasta bertanggung jawab atas resiko, 4) Fasilitas umum tanas atau sumber daya lain dan ditransfer. (William J (2005)).

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori maka kerangka pemikira teoritik pada penelitian ini dapat dijelaskan pada bagan berikut ini dengan melihat beberapa model kemitraan dalam menanagani kasus perparkiran di kota makassar.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada studi ini berfokus pada empat kemitraan dalam rumusan masalah dapat dilihat dari indikator berikut:

1. Swasta Menjalankan Fungsi Pemerintah
2. Swasta Menerima Kompensasi
3. Swasta Bertanggung Jawab Atas Risiko
4. fasilitas umum, tanah atau sumber daya lain dapat ditransfer

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada studi ini berfokus pada empat model kemitraan dalam melakukan analisis *public private partnership* dalam implementasi kebijakan perpajakan di Kota Makassar yaitu:

1. Pihak Swasta Menjalankan Fungsi Pemerintah Untuk Jangka Waktu Tertentu Dalam *Public Private Partnership* Antara PT. ISS Indonesia Dengan PD Parkir Kota Makassar
2. Pihak Swasta Menerima Kompensasi Untuk Melakukan Fungsi, Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dalam *Public Private Partnership* Antara PT. ISS Indonesia Dengan PD Parkir Kota Makassar
3. Pihak Swasta Bertanggung Jawab Atas Risiko Yang Timbul Dari Melakukan Fungsi Dalam *Public Private Partnership* Antara PT. ISS Indonesia Dengan PD Parkir Kota Makassar
4. Fasilitas Umum, Tanah Atau Sumber Daya Lain Dapat Ditransfer Atau Tersedia Untuk Pesta Pribadi Dalam *Public Private Partnership* Antara PT. ISS Indonesia Dengan PD Parkir Kota Makassar

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilakukan selama tiga bulan. Lokasi yang dipilih adalah Perusahaan Daerah (PD.Parkir) dan *International Space Station* (PT.ISS) dilaksanakan di Kota Makassar dalam melakukan kontrak kerjasama. Adapun alasan memilih objek tersebut karena adanya pengelolaan parkir serta untuk dapat mengetahui bagaimana *Public Private Partnership* antara PT. ISS Indonesia dengan Pemerintah Kota Makassar (PD Parkir).

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Berkaitan dengan tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran mengenai *Public Private Partnership* di Kota Makassar antara PT. ISS Indonesia dengan Pemerintah Kota Makassar Perusahaan Daerah (PD Parkir), maka jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu mendeskripsikan suatu objek fenomena, atau setting sosial terjewantah dalam suatu tulisan yang bersifat narati. Artinya, data, fakta, yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka-angka. Mendeskripsikan suatu kejadian terjadi (Satori dan Komariah 2009 : 28), yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan tentang *Public Private Partnership*.
2. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan. Adapun masalah yang diteliti adalah mengenai *Public Private Partnership* antara *International*

Space Station (PT. ISS) dengan Pemerintah Kota Makassar Perusahaan Daerah (PD Parkir).

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Jenis data yang ingin diperoleh adalah mengenai *Public Private Partnership* antara *International Space Station* (PT. ISS) dengan Pemerintah Kota Makassar Perusahaan Daerah (PD Parkir), serta data-data lain yang dibutuhkan untuk melengkapi penyusunan proposal.
2. Data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian. Adapun laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data tentang bagaimana tata kelola parkir di Kota Makassar

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk memperoleh data secara representif, maka diperlukan informan kunci yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji (Morse 1991). Informan dalam penelitian ini:

1. Direktur PD.Parkir Makassar Raya
2. Kepala bagian Umum PD.Parkir Makassar Raya

3. Humas PD.Parki Makassar Raya
4. Pengelolaan PD.Parkir Makassar Raya
5. Staf PD.Parkir Makassar Raya
6. Staf PT.ISS CABANG MAKASSAR

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2016 : 137) sebagai berikut :

1. Teknik observasi

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan langsung dilapangan yang merupakan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian dan yang dilakukan adalah pengamatan langsung terhadap aktivitas *Public Private Partnership* antara *International Space Station* (PT. ISS) Indonesia dengan Pemerintah Kota Makassar Perusahaan Daerah (PD Parkir).

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara melakukan wawancara kepada beberapa informan yang diambil antara lain, Walikota Makassar, DPRD Kota Makassar, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, PD Parkir, Pimpinan PT ISS dan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data, dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang diambil dari beberapa sumber seperti buku, arsip, tabel maupun data yang tersimpan dalam *website*.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Meles dan Hubrmen (Sugiyono,2016 : 246) menegemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : Data Reduksi, Data display dan *conclusion drawing* atau *verification*.

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian, bagi peneliti pemula proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingatkan bahwa penelitian kualitatif banyak menyusun teks naratif. Display adalah format yang menyajikan informasi

secara tematik kepada pembaca. Miles dan Huberman (Sugiyono,2016 : 244) memperkenalkan dua macam format, yaitu: diagram konteks (*context chard*) dan matriks.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data bentuk batasan berkaitan suatu kepastian, bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang cepat. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Moleong dalam (Ibrahim,2015: 124) Triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membanding-bandingkan antara sumber,teori, maupun metode/teknik penelitian . pemeriksaan keabsahan data ini adalah 3 teknik triangulasi : triangulasi sumber,triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan dengan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang berkaitan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu. Perubahan suatu proses dan perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara 119° 24' 17" 38" bujur Timur dan 5° 08' 6" 19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep-Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa-Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan "angin mammiri" ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia.

2. PD. Parkir Makassar Raya

PD. Parkir Makassar Raya merupakan salah satu Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah perusahaan daerah yang didirikan oleh pemerintah kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk mengelola perparkiran di wilayah kota Makassar. Tujuan utama dari pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efektivitas dalam

pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sektor retribusi parkir.

Dalam pengaturan pemarkiran, Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya diberikan kewenangan untuk menyiapkan para juru parkir yang sudah terlatih agar siap terjun ke lapangan. Perusahaan ini juga melakukan pengawasan terhadap adanya para juru parkir tidak resmi yang mengatas namakan perusahaan hanya untuk kepentingan pribadi. Diharapkan bahwa Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dapat mengatasi permasalahan parkir tidak resmi di kota Makassar yang semakin meningkat dan mengganggu kepentingan umum. Pemerintah juga diharapkan berperan aktif untuk menyediakan fasilitas-fasilitas parkir yang resmi agar tidak ada lagi parkir tidak resmi.

Dalam Penelitian ini, hanya mengambil satu lokasi sebagai tempat penelitian yang merupakan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya sebagai lokasi dalam penelitian ini. Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya DATI II Ujung Pandang No. 5 Tahun 1999, tentang: Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar, No.16, Tahun 2006. Pemikiran Pemerintah Kota Makassar untuk membentuk Perusahaan Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pelayanan dari sektor perparkiran kepada masyarakat Kota Makassar. Di samping itu kegiatan perparkiran di kota Makassar juga merupakan

salah satu objek yang mempunyai prospek untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Makassar. Jadi dengan kehadiran Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya, selain diharapkan menunjang pelaksanaan otonomi daerah juga dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

1. Visi Dan Misi

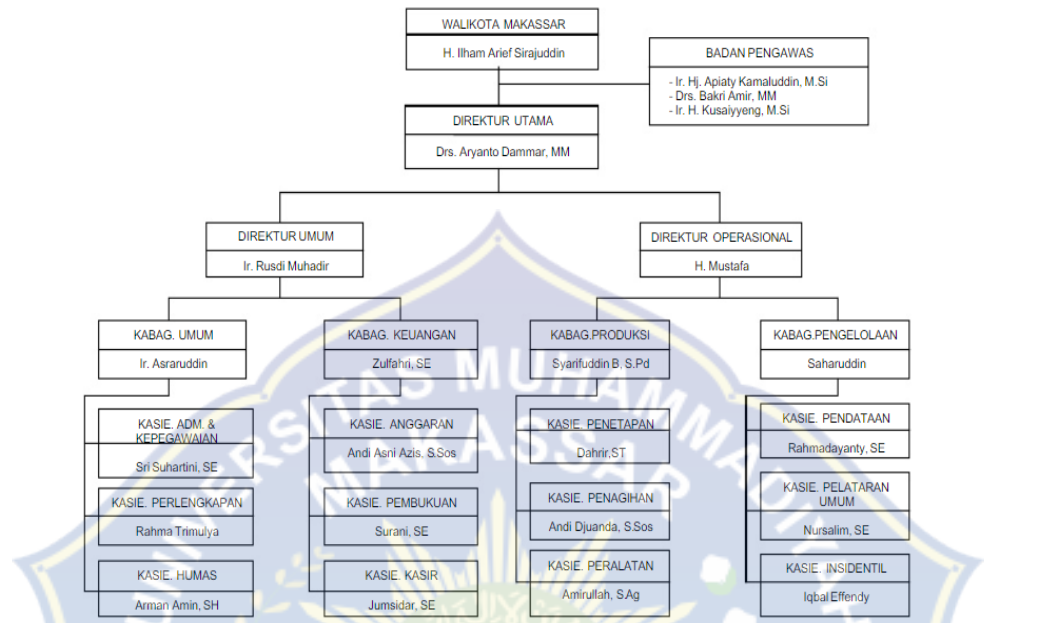
Visi : menjadikan PD. Parkir kota makassar sebagai perusahaan daerah terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar

Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD.Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan.
- 2) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan.
- 3) Menggali area kawasan perparkiran baru yang berpotensi secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan Kota Makassar menuju kota maritim dan perdagangan dunia.
- 4) Memupuk dan mengembangkan kerjasama kemitraan dengan dunia usaha perguruan tinggi dan lembaga-lembaga iptek baik dalam maupun luar negeri dalam rangka pengembangan organisasi PD. Parkir dan peningkatan layanan kepada masyarakat agar sarana dan masukannya agar dapat dipertimbangkan guna kemajuan sistem perparkiran Kota Makassar.

2. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi PD.Parkir Makassar Raya sebagai berikut :



Gambar : 4.1. Struktur Organisasi PD Parkir Makassar

3. PT. ISS Indonesia Cabang Makassar

ISS didirikan tahun 1901 di Copenhagen dan telah berkembang menjadi Badan Usaha Facility Services terbesar di dunia. Saat ini ISS mempunyai perusahaan di 50 negara yang tersebar di Eropa, Amerika Utara, Amerika Latin, Asia dan Pasific dengan karyawan lebih dari 530.000 orang.

ISS merupakan satu-satunya perusahaan alih daya yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk melayani pelanggan dengan berbagai jenis pelayanan mulai dari Cleaning Service, Security Service, Catering Services, Parking Management, Office Support Services, Pest Control Services, Washroom Services, High Rise Cleaning, Gardening & Landscaping, Housekeeping Management, M&E Maintenance dan lain-lain. ISS merupakan pelopor system

online di Parking Management yang mengedepankan sistem keterbukaan dan telah mendapat apresiasi dari beberapa kota di Indonesia. Bahkan, ISS mampu menciptakan model pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Selanjutnya ISS merupakan satu-satunya perusahaan alih daya yang memiliki kapabilitas dan kapasitas untuk melakukan koordianasi dan integrasi semua jenis pelayanan pendukung, yang disebut dengan IFS, Integrated Facility Services. Akibatnya, pelanggan mampu meningkatkan produktifitas mereka karena mereka lebih fokus terhadap bisnis utama mereka.

ISS Indonesia berdiri sejak tahun 1996 dan sekarang menjadi Badan Usaha Facility Services terbesar dan terbaik di Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 62.000 me.

layani lebih dari 3000 pelanggan yang tersebar di 135 kota atau lebih. Berpusat di Jakarta, ISS Indonesia memiliki 10 Cabang antara lain: Medan, Pekanbaru, Batam, Balikpapan, Bandung, Semarang, Bali, Makassar dan Palembang.

PT ISS Indonesia merupakan Badan Usaha Facility Service terbesar dan terbaik di Indonesia, menawarkan layanan berskala internasional dengan pengetahuan dan pengalaman terbaik. ISS Indonesia juga merupakan satu-satunya perusahaan alih daya di Indonesia yang mampu mengelola resiko ketenaga-kerjaan sebelum, sewaktu dan setelah masa kerja karyawannya karena telah menyelenggarakan program Transfer Pengalihan Hak yang disebut dengan TUPE (Transfer of Undertakings Protection of Employment) sejak tahun 2001. TUPE merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan UU Tenaga Kerja No

13/2003, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.19/2012 serta Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-XI/2011.

ISS Indonesia bertumbuh dan berkembang secara pesat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 35% selama 12 tahun terakhir, merupakan anak perusahaan ISS A/S yang paling pesat pertumbuhannya di seluruh dunia. Rata-rata umur kontrak ISS Indonesia dengan pelanggan ialah 7 tahun lebih merupakan tanda loyalitas pelanggan yang sangat tinggi dari tahun ketahun. Hal ini dibuktikan juga dengan hasil Customer Survey 2013 yang menunjukkan skor NPS sebesar 77%. ISS Indonesia merupakan salah satu anak perusahaan ISS A/S terbaik di dunia dan telah menerima 18 Award dalam kurun waktu 12 tahun. Tidak ada Negara lain yang menerima award sebanyak itu. ISS telah mampu mengembangkan bisnisnya secara luar biasa mulai dari *Claeaning Service, Office Supports, Gardening, Landscaping, Pest Control, Access Control, Catering Services* dan yang terakhir ialah *Parking Management*.

ISS Indonesia adalah perusahaan yang mengedepankan prinsip tata kelola yang baik atau *Good Governance Principle*. Dengan demikian nama baik dan merek dagang pelanggan terlindungi sekaligus membangun nama baik dan reputasi dari merk dagang ISS sendiri. Sampai saat ini, ISS Indonesia telah berkembang menjadi salah satu perusahaan Layanan Fasilitas Terintegrasi Terpadu dengan lebih dari 61.000 karyawan dan 3500 klien tersebar di seluruh wilayah negara. PT ISS Indonesia.

Sekarang PT ISS yang berada di Indonesia berpusat di Graha ISS, Jl. Sudirman Blok J No. 3, Bintaro Jaya, PD Pucung, PD Aren, Kota Tangerang

Selatan, Banten dan PT ISS Indonesia Cabang Semarang Jl. Kedungmundu Raya No. 47, Tandang, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50274.

a) VISI :

“Untuk menjadi Organisasi Layanan Terbesar di Indonesia” Visi ISS Indonesia adalah untuk menjadi Layanan Fasilitas Terpadu yang paling disukai di Indonesia. PT. ISS sekarang sedang menuju realisasi Visi. Ini dibuktikan dengan pertumbuhan organik besar-besaran tahun demi tahun; tingkat retensi pelanggan yang tinggi, tingkat retensi karyawan yang tinggi, dan ROCE yang sehat, Selain itu, ISS Indonesia adalah Juara Dunia dan salah satu yang terbaik dalam Kepemimpinan Kualitas dalam Dunia ISS.

b) MISI :

1. Kepemimpinan Berkualitas Tinggi.
2. Manajemen Portofolio Besar.
3. Organisasi Fokus Pelanggan yang Hebat.
4. Pengembangan IFS Luar Biasa.
5. Keunggulan Proses.

B. Analisis Public Private Partnership (P3) Dalam Implementasi Kebijakan Perpajakan Di Kota Makassar

Otonomi daerah telah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan lokal secara bijaksana. Namun implementasi kebijakan tersebut belum maksimal diterapkan karena keberadaan daerah-daerah otonom baru tidak diiringi dengan kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Dengan demikian banyak terjadi keterlambatan dalam pembangunan terutama pembangunan infrastruktur.

Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mencari solusi atas persoalan tersebut dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan Non Governmental Organisation (NGO), serta dan lain-lain. Keterlibatan berbagai pihak ini memiliki peran penting untuk membantu pemerintah mengingat tidak semua aktivitas pembangunan mampu dikerjakan oleh pemerintah sendiri terutama dalam hal ketersediaan skill SDM dan finansial sehingga perlu keterlibatan pihak swasta. Bentuk kerjasama yang melibatkan pihak swasta ini dikenal dengan public private partnership (PPP).

Lebih lanjut ada tiga hal yang mendorong pemerintah untuk melakukan kerjasama pemerintah dan swasta (PPP) karena masalah keterbatasan dana, efisiensi dan efektivitas pemerintahan, dan pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Sebagai suatu daerah yang baru berkembang tentunya pemerintah daerah tidak dapat mengandalkan sumber daya yang ada (keuangan dan SDM). Disini pemerintah daerah butuh menarik pihak swasta untuk melakukan investasi tidak hanya dalam bentuk dana tetapi juga peningkatan skill SDMnya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dan sudah tersedia dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Dalam mengatasi masalah perparkiran dikota makassar sangat dibutuhkan kemitraan dengan berbagai pihak, dimana model kemitraan terdiri dari 4 yang dikemukakan oleh William J (2005) yaitu : 1) pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu, 2) pihak swasta menerima kompensasi untuk melakukan fungsi secara langsung atau tidak

langsung, 3) pihak swasta bertanggung jawab atas resiko yang timbul dari melakukan fungsi dan 4) fasilitas umum, tanah, sumber daya. Keempat model ini menjadi konsep yang dibahas pada bagian ini.

1. Pihak swasta menjalankan fungsi pemerintah untuk jangka waktu tertentu.

Pihak swasta yang dimaksud disini adalah organisasi privat (PT. ISS) yang terlibat kontrak kerja sama dengan pemerintah daerah (PD Parkir Makassar Raya) dalam mengelola perparkiran di Kota Makassar. PT. ISS menjalankan fungsi pemerintah melakukan tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan dibidang perparkiran dengan mengedepankan Good Governance Principle. Untuk mewujudkan tata kelola perparkiran yang baik maka diperlukan fungsi manajemen untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan perparkiran di Kota makassar. Adapun fungsi manajemen yang sering di pakai oleh organisasi salah satunya adalah POAC.

a. Planning (Perencanaan)

Perencanaan merupakan susunan langkah-langkah sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam melakukan perencanaan ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan organisasi dan membuat anggaran. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan dari PD.Parkir Makassar Raya. Berdasarkan hasil wawancara dibawa ini:

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan DS dari direktur PD.Parkir Makassar Raya terkait dengan planning (Perencanaan) mengatakan bahwa :

“Setiap tahun PD Parkir Makassar Raya Menentukan target untuk dicapai dengan melihat potensi-potensi yang ada dan setiap tahunnya target

senantiasa bertambah sesuai dengan perkembangan kota yang semakin tahun semakin meningkat”. (Hasil wawancara dengan DS pada tanggal 22 september 2018)”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak ID selaku Kabag. Pengelolaan bahwa :

“Penentuan target pertahun didasarkan pada penentuan dan perluasan titik-titik kawasan yang dapat dijadikan sebagai lahan parkir dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentase jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai itulah yang menjadi acuan kami untuk menetapkan target penerimaan retribusi parkir pertahun disetiap kawasan perparkiran, penentuan target pertahun juga ditinjau dari peningkatan efisiensi biaya operasional dan biayabiaya tak terduga lainnya”. (Hasil wawancara 22 september 2018)”.

Selain itu hasil wawancara lainnya dilakukan dengan informan MS dari bagian humas PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa :

“Persoalan mendasar kami dalam penentuan target pertahunnya adalah masih ada kawasan perparkiran yang tersebar di bebarapa titik di Kota Makassar yang tidak masuk dalam pendataan di PD Parkir sehingga terjadi perbedaan target pertahunnya”.(Hasil wawancara 22 november 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas mengatakan bahwa dalam perencanaan fungsi manajemen dalam suatu kerjasama perlu adanya suatu target yang maksimal agar tercapainya suatu perencanaan yang maksimal. Hal ini menjadi permasalahan yang dialami oleh pihak dari swata yang dimana informan direktur MD PT.ISS mengemukakan bahwa :

“Kendala yang selama ini dihadapi sehingga target tidak tercapai secara maksimal yang berkaitan dengan perencanaan adalah para staf-staf yang tidak bertanggung jawab penuh dengan adanya suatu fungsi-fungsi yang sudah diterapkan , dalam artian setiap staf harus memahami dan megetahui fungsi suatu manajemen itu”. (Hasil wawancara,10 Desember 2018)

Pernyataan MD senada dengan pendapat informan dari staf PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“kendala yang didapatkan ya biasa juga, tapi itu biasa dirapatkan dengan pimpinan dan staf-staf lain untuk membahs suaru perencanaan kegiatan yang efektivitas”.

Pernyataan MD juga senda denganpendapat informan AD staf pengelola PT.ISS mengatakan bahwa :

“kendala itu dek biasaji terjadi dalam suatu lingkup kerja ataupun suatu perusahaan, tapi masalah perencanaan anggaran atau organisasi biasa kita kordinasikan kepada pimpinan saja dek”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa suatu perencanaan organisasi dan penganggaran dalam suatu kerjasama harus di rencanakan dengan pimpinan , tapi dalam setiap kendala-kendala yang terjadi itu sudah biasa dalam suatu pekerjaan perusahaan tersebut.

b. organising (perorganisasian)

Pengorganisasian merupakan fungsi kedua dalam manajemen dan pengorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisaisi sesuai dengan tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Dengan demikian hasil pengorganisasian adalah struktur organisasi. Pengorganisasian adalah suatu langka untuk menetapkan, menggolongkan dan mengatur berbagai macam kegiatan yang dipandang. Seperti bentuk fisik yang tepat bagi suatu ruangan kerja administrasi serta penetapan tugas dan wewenang seseorang pendelegasian wewenang dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Pengorganisasian (organizing) merupakan suatu fungsi manajemen yang dipandang sebagai alat yang dipakai oleh orang-orang atau anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Dalam fungsi ini orang-orang atau

anggota organisasi tersebut 56 dipersatukan melalui pekerjaan masing-masing yang pekerjaan-pekerjaan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dalam suatu organisasi bagian-bagian tersebut adalah orang atau anggota-anggotanya yang satu sama lain mempunyai hubungan yaitu melakukan pekerjaan masing-masing demi tercapainya tujuan bersama. Dua aspek utama proses susunan struktur organisasi yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Departementalisasi adalah pengelompokan kegiatan-kegiatan kerja organisasi agar kegiatan-kegiatan sejenis saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Hal ini akan tercermin pada struktur formal suatu organisasi dan tampak atau ditunjukkan oleh bagan suatu organisasi. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan dari PD.Parkir Makassar Raya. Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan DS dari direktur PD.Parkir Makassar Raya terkait dengan planning (Perencanaan) mengatakan bahwa :

“Insya Allah semua pegawai yang ada di Kantor PD Parkir Makassar Raya telah ditempatkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing *the right man and the pleace* dan kedepan jabatan-jabatan akan saya seleksi agar dapat sesuai dengan kemampuannya”. (Hasil wawancara 21 november 2018)

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh AR staf pengelolaan PD.Parkir Makassar Raya yang mengatakan bahwa:

“ya kami juga disini dek mau semua pegawai bekerja dengan sesuai jabatan atau posisi yang ditetapkan kerja dengan baik dan dengan skill yang mereka punya biar pekerjaan yang sesuai manajemen baik ”. (Hasil wawancara, 22 November 2018)

Adapun hasil wawancara yang senada dengan informan DS staf humas PD.Parkir makassar Raya mengatakan bahwa:

“Setiap hari saya mengontrol semua pegawai yang memiliki peran penting dalam suatu pengeolaan dalam melaksanakan manajemen yang baik untuk mengawasi paraterjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mereka”.
(Hasil wawancara , 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan diatas dapat diketahui bahwa dalam sebuah pengoragnisian dalam setiap manajemen dibutuhkan kerja sesuai dengan fungsi masing-masing dan kerja dengan efektifitas untuk mencapai bentuk organisasi yang baik.

Adapun wawancara dari PT.ISS yang dimana informan TS staf kepegawaian PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“kalau masalah perorganisasian itu dek sudah dibentuk dengan pimpinan dan dimana kita kerja dengan sesuai prosedur yang ada”.
(Hasil wawancara, 23 November 2018)

Adapun hasil wawancara yang senada dengan FD staf PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“begini dek saya kurang mengetahuinya yang jalas kami disini kerja sesuai standar oprasional prosedur (SOP)”.
(hasil wawancara, 23 November 2018)

Wawancara diatas senada dengan informan TS staf pengelolaan PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“disini dek kami dalam menunjang organisasi agar lebih efektif kita selalu mengadakan rapat bersama untuk membahas bagaiman pengelolaan perparkiran di kota makassar”.
(Hasil wawancara, 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diasta beberapa informan saya menyimpulkan bahwa dalam sistem manajemen dalam perorganisasian pimpinan harus mengadakan sebuah rapat bersama mengenai pengelolaan perparkiran di kota makassar dan karyawan harus kerja sesuai standar oprasional prosedur (SOP)

c. Penggerakan (Actuating)

Penggerakan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi actuating artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Secara sederhana, penggerakan dapat diartikan sebagai usaha untuk menggerakkan. Fungsi penggerakan di ibaratkan seperti motor pada sebuah mesin, sehingga fungsi penggerakan akan menggerakkan mesin-mesin agar biasa bekerja sesuai tugasnya masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggerakan merupakan kegiatan menggerakkan orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi agar mau bergerak dan bekerja untuk mencapai visi- misi dan tujuan organisasi dalam kerja sama Hasil wawancara dengan direktur PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“Setiap bulan kami melakukan pengawalan turun langsung ke titik-titik parkir yang ada untuk member arahan kepada para juru parkir tentang aturan-aturan yang harus dilakukan, selain itu pula kami memiliki pengawas yang memang langsung bertugas setiap hari untuk mengawasi kondisi yang ada di lapangan dan dari pengawas juga kami dapat tahu permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan”. (Hasil, wawancara : 22 November 2018)

Adapun hasil wawancara yang senada dengan DS dengan informan SS humas PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“setiap saat kami selalu mencari titik-titik parkir baru melalui pengawas kami karena pengawas itu tidak hanya bertugas untuk melakukan pengawasan tetapi juga mempunyai tugas untuk mencari potensi parkir baru sehingga para pengawas ini berkerja siang dan malam dan kemudian jika mendapat titik potensi parkir baru maka dia kemudian melaorkan ke

PD Parkir sehingga dapat di daftar kemudian turun ke lokasi untuk data setelah itu bkita lihat potensi pendapatannya kemudian menentukan kelayakan yang harus di stor dari titik parkir baru tersebut, kemudian kami resmikan”. (Hasil wawancara, 23 November 2018)

Hasil wawancara lainnya senada dengan Staf Pegawai PD.Parkir Makassar

Raya mengatakan bahwa:

“setiap ada lokasi perparkiran yang didapat oleh pengawas yang belum terdaptar di PD Parkir maka loksi tersebut akan didaftarkan beserta juru parkir yang ada disana sehingga yang dulunya berstatus sebagai juru parkir liar maka akan diresmikan oelh PD Parkir, jadi hal ini menguntungkan kedua belah pihak dimana PD Parkir bertambah amunisi pendapatannya sedangkan juru parkir liar ini bias berstatus resmi”. (Hasil wawancara, 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dalam pelaksanaan kelompok dalam perparkiran dimakassar. Dengan menjadikannya resmi maka pendapatan PD Parkir akan bertambah pula, kemudian juru parkir liar pun akan berkurang sedikit demi sedikit. Suatu target pendapatan pertahun akan tercapai jika ada upaya dari PD Parkir Makassar Raya untuk meningkatkan kawasan perparkiran yang ada di kota Makassar.

Hasil wawancara dengan PT.ISS Makassar yang informan TS direktur PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“kami disini mendorong para pegawai untuk dalam melaksanakan tugasnya dilapangan agara lebih baik lagi dan agar terciptanya perparkiran lebih baik lagi”. (Hasil wawancara, 23 November 2018)

Adapun hasil wawancara yang senada dengan informan MD staf kepegawaian PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“kalau masalah itu dek tergantung dari pegawainya, tapi kami disini harus melaksanakan tugas sesuai dengan tugas kita masing-masing yang telah diberikan kepada pimpinan kami”. (Hasil wawancara, 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas maka saya dapat simpulkan bahwa dalam suatu pergerakan (*Actuating*) seharusnya setiap anggota kelompok harus bekerja sesuai tugas masing-masing agar tercapainya hasil yang baik.

d. Controlling (Mengontrol/ Pengawasan)

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Tak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi parkir bisa diminimalisir.

2. Pihak Swasta Menerima Kompensasi Langsung Maupun Tidak Langsung

Pemerintah memberikan kompensasi terhadap kinerja dari pihak swasta dalam suatu kerjasama dalam menangani perparkiran di kota makassar. Bahwasannya dimana kinerja karyawan dari pihak swasta telah berhasil menjalankan fungsi dari pemerintah dengan baik adapun kompensasi itu yang secara langsung dan tidak langsung seperti :

a. Kompensasi Langsung

Kompensasi langsung merupakan bayaran pokok (gaji dan upah, bayaran prestasi, insentif (bonus, komisi, pembagian laba/ keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertanggung (program tabungan dan anuitas pembelian saham).

b. Kompensasi Tidak Langsung

Kompensasi tidak langsung merupakan program-program proteksi (asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja), bayaran diluar jam kerja dan fasilitas-fasilitas yang disediakan pemerintah dan pihak swasta seperti kendaraan, ruang kantor dan tempat parkir.

c. Tujuan pemberian kompensasi

Menurut Notoatmodjo (1998:67), tujuan kebijakan pemberian kompensasi yaitu:

- 1) Menghargai prestasi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- 2) Menjamin keadilan gaji setiap karyawan
- 3) Mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan
- 4) Memperoleh karyawan yang bermutu
- 5) Pengendalian biaya
- 6) Memenuhi peraturan dalam perjanjian kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan informan AS dari PD.Parkir

Makassar Raya terkait dengan kompensasi mengatakan bahwa :

“...Kompensasi langsung : ya saya kurang tau juga masalah kompensasi, tapi pernah dari pihak swasta memberikan kami 10% dari pendapatan mereka dari hasil perparkiran dalam 1thn pada tahun 2013 itu pun hasil atau pendapatan mereka biasa melebihi dari target pendapat dalam pertahunnya dan pemberian kompensasi itupun biasa jarang kami dapatkan, dan biasa dari PD.parkir sendiri kami memberikan kompensasi

terhadap karyawan yang kerja yang baik dan kami memberikan upah yang lebih atau semacam insentif. Kompensasi tidak langsung : tidak ada kompensasi yang diterima secara tidak langsung. (Hasil wawancara dengan AS pada tanggal 22 November 2018).”

Adapun wawancara yang senada dengan informan DS staf PD.Parkir

Makassar Raya mengatakan bahwa :

“..Langsung: pemerintah tidak membangun infrastruktur dan pihak swasta yang membangun lahan parkir. Tidak langsung : dalam setiap pendapat kita ada dibidang pendapatan impiden karna kita tidak di subsidi karna kita memang dan infrastruktur sudah jelas di perda seperti tepi jalan dan kita juga selalu melihat kondisi dibawah yang mana harus diperbaiki dalam parkir. (Hasil wawancara dengan DS pada tanggal 23 November 2018)

Berdasarkan wawancara di atas senada dengan AR Staf pengelolaan

PD.Parkir Makassar mengatakan bahwa:

“..Langsung : begini dek dalam suatu kerja sama antara PD.Parkir Makassar Raya dan PT.ISS pasti kita saling memberikan suatu kompensasi mau secara langsung ataupun tidaklangsung, tapi biasa pimpinan atau direktur dari pihak swata (PT.ISS) biasa memberikan kompensasi kepada kantor kami bahwa itu suatu tanda kerjasama yang baik yang dimana target-target pendapatan biasa mencapai atau memuskan dari pihak tersebut kalau dibidang komsensasi apa yang diterima ya biasa berupa materi ataupun suatu penghargaan buat kami. Tidak langsung : kalau masalah kompensasi tidak langsung dek saya kurang mengetahinya hanya itu saja yang saya tau dek kompensasi langsung”. (Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 23 Nomenber 2018)

Berdasarkan diatas bahwa kompensasi yang diterima pemerintah dari

pihak swasta itu sangatlah berguna atau bermanfaat bagi pihak pemerintah dan

sebaliknya karna itu bagian dari suatu kerja sama ataupun kerja team dalam suatu

mencapaian target yang sudah disepakati bersama.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dari pihak swata (PT.ISS)

dengan informan MA yang mengatakan bahwa:

“dengan adanya setiap kompensasi yang diberikan pemerintah itu untuk dapat meningkatkan kinerja yang diharapkan biar dapat mencapai tujuan

yang yang diinginkan dan dari pihak kami juga agar karyawan kami bisa memberikan kinerja yang baik terhadap perusahaan kami”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 25 november 2018)

Hasil ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Staf

kepegawaian PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“ini dek kompensasi yang diberikan itu bentuk dimana suatu tujuan yang berhasil kita capai dalam kerjasama yang dimana setiap perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih karena berkat kerjasama dalam tujuan organisasi”. (Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 25 November 2018)

Hasil wawancara diatas sendah dengan MD staf PT.ISS yang mengatakan

bahwa:

“dalam setiap pemberian kompensasi itu dek saya juga biasa kurang mengatahuinya karena dalam setiap pimpinan saja yang mengetahinya saya hanya staf biasa tdk mengetahui hal tersebut”. (Hasil wawancara dengan MD pada tanggal 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas saya dapat simpulkan bahwa setiap pemberian kompensasi dalam setiap kerjasama itu sudah harusnya dibicarakan dalam suatu bentuk kontak kerjasama dari awal agar masing-masing pimpinan dapat memberikan motivasi setiap karyawan dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang baik.

3. Pihak Swata Bertanggung Jawab Atas Resiko

Pihak Swasta yang dimaksud di sini adalah (PT.ISS) yang terlibat kontrak kerja dengan pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) dalam pengelolaan perparkiran di Kota Makassar dalam kerjasama biasa terjadi tanggung jawab atas resiko yang diterima oleh swasta (PT.ISS) maupun (PD.Parkir Makassar Raya) yang dimana resiko yang timbul adalah terjadinya salah memilih partnert tem dalam melaksanakan tugas dilapangan yang dimana tidak adanya kerja yang baik

dalam 1team dan resiko, hilangnya kontrol pemerintah, penambahan biaya (jika tidak tepat penetapan tarif dan biaya sosial lain), resiko finansial berupa arus kas dalam pelaksanaan dan berkurangnya kualitas/efisiensi pelayanan.

Dalam kerjasama pemerintah dan swasta yang memiliki tujuan yang sama-sama membiayai, membangun, mengelola, dan juga merawat sarana dan prasarana pelayanan publik dalam bentuk infrastruktur demi meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan di Kota Makassar .

Resiko Swasta (PT.ISS) dan Pemerintah (PD. Parkir Makassar Raya)

Resiko dalam kerjasama pemerintah dan pihak swasta adalah apabila terjadinya perubahan pemerintah seperti terjadi yang dimana ada proyek yang terhambat dan berhenti karena tidak ada transparannya kontrak kerjasama antara pihak swasta. Resiko dalam aspek pemerintah merencanakan proyek jangka panjang yang ternyata bertubrukan dengan kepentingan kerjasama pemerintah-swasta yang sedang berjalan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan AS dari PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa :

“...komplen masyarakat terhadap pengalaman jupir biasa mengabaikan macet gara-gara banyaknya kendaraan yang asal parkir saja kami setiap hari didatangi masyarakat hanya mendengarkan komplen, dan kesalahan yang dibuat dari PT.ISS tapi komplennya di kantor kami. (Hasil wawancara dengan AS pada tanggal 22 november 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa dalam menerima resiko itu biasanya PD.Parkir yang dapatkan komplen dari masyarakat pada dasarnya yang harus bertanggung jawab adalah PT.ISS hal

tersebut senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan MA dari Humas

PD.Parkir Makassar Raya yang mengatakan bahwa :

“komplek masyarakat terhadap PD parkir, adanya pengelolaan PD parkir yang lain, tapi mengatasnamakan PD parkir atau parkir liar dan masalah dari PT.ISS MAKASSAR mengaduhkannya di PD. Parkir padahal itu bukan dari pihak PD.parkir yang mengelola, ada juga yang tidak memiliki lahan parkir, tetapi masyarakat di berikan biaya parkir tapi tidak mendapatkan karcis dan keluhan-keluhan soal tarif yang tidak sesuai kita sudah sering dapat masalah dari masyarakat dan oknum-oknum yang mengatasnamakan PD.parkir padahal dia hanya parkir liar. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 22 November 2018)

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepala pengelolaan PD.Parkir Makassar Raya informan AR yang mengatakan bahwa :

“...komplek masyarakat terhadap pengalaman jupir biasa mengabaikan macet gara-gara banyaknya kendaraan yang asal parkir saja kami setiap hari didatangi masyarakat hanya mendengarkan komplek, dan kesalahan yang dibuat dari pt.iss tapi kompleknya di kantor kami”. (Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 06 Desember 2018).

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa resiko yang diterima oleh pihak Swasta ternyata yang dapat adalah pihak pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) maka dalam pengambilan keputusan yang ada dilapangan dan dapat mengatasi resiko tersebut dengan baik dan di rapatkan dengan sesuai kontrak kerjasama. Beda pendapat dengan PT.ISS yang diungkapkan oleh MA mengatakan bahwa:

“begini dek kalau masalah resiko yang timbul dari kami atau dari kerjasama antara pihak kami dan pihak pemerintah itu biasa, tapi dari pihak kami terima saja dari resiko itu karena dari resiko yang kami dapat itu kita rapatkan dengan pimpinan bagaimana kita menerima dan memberikan yang terbaik itu saja dek”. (Hasil wawancara dengan MA pada tanggal 22 November 2018)

Adapun hasil wawancara yang senada dengan informan TS staf PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“resiko dalam kerjasama itu sudah biasa dek dan itu juga harus jadi konsekuensi dari pihak kami dan dari pihak pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) dan kita biasa rapatkan dengan pimpinan bagaimana kita mengatasi resiko yang biasa timbul dari setiap kerjasama”. (Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 23 November 2018)

Hasil wawancara diatas senadah dengan informan MD staf kepegawaian

PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“ya kalau resiko dalam kerjasama itu dek biasaji terjadi jadi tergantung pimpinan bagaimana cara mengatasinya ituji saja dek. (Hasil wawancara dengan MD pada tanggal 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas saya simpulkan dari setiap resiko yang timbul dalam kerjasama itu biasa terjadi dan setiap pimpinan baik dari pihak swasta (PT.ISS) maupun pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) harus bisa menerima dan bagaimana bisa mengatasinya dengan baik.

4. Fasilitas Umum, Tanah Atau Sumber Daya Lain

Fasilitas umum merupakan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi yang diperlukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Dalam hal ini pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) yang menyediakan fasilitas dalam bentuk lahan (Parkir) sedangkan pihak Swata (PT.ISS) yang akan mengelolanya dengan menyediakan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dengan SD dari PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“kita menyediakan lahan parkir dan fasilitas yang lain adalah kita memberikan pelayanan dan kami juga menyediakan atribut oleh jupi resmi yang sudah terdata di kantor kami seperti ; atribut,baju dan karcis yang paling penting”. (Hasil wawancara dengan SD pada tanggal 22 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengatakan bahwa dalam menyediakan fasilitas itu sangat penting dalam suatu kerjasama hal tersebut senadah dengan informan wawancara yang dilakukan oleh AR dari PD.Parkir Makassar Raya mengatakan bahwa:

“kalau fasilitas yang didapat dari pemerintah yaitu, adanya surat keputusan yang bisa mengelola perparkiran di tepi-tepi jalan yang dikelola pihak pemerintah maupun pihak swasta dan fasilitas yang diberikan oleh jupir seperti baju, *ID Card*, sempritan dan karcis dan mereka juga diberikan jaminan asuransi BPJS oleh jupir yang resmi dan tiap tahun juga kami berikan uang walupun tidak seberapa”. (Hasil wawancara dengan AR pada tanggal 22 November 2018)

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kepala pengelola PD.Parkir Makassar Raya informan DS mengatakan bahwa:

“kaya ditepi jalan kita memiliki jupir yang resmi dimana jupir tersebut mendapatkan baju dan id card dan supritan bahwa diketahui dia adalah jupir resmi dari PD. Parkir”. (Hasil wawancara dengan DS pada tanggal 22 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa fasilitas yang disediakan oleh PD. Parkir Makassar raya menyediakan fasilitas itu penting dan berguna bagi pihak-pihak dari PT. ISS karena dimana dalam kontrak kerjasama sudah sepakat dalam suatu pengambilan keputusan dalam penyediaan fasilitas. Adapun hasil wawancara dari pihak Swasta (PT.ISS) yang dimana pihak hasil wawancara informan FD direktur PT.ISS mengatakan bahwa:

“begini dek kalau masalah kompensasi itu biasa hanya pihak kami dan pihak pemerintah yag tau karna kami tidak biasa menyampaikan itu, tapi kalau masalah kompensasi biasa kami memberikan pemerintah beberapa persen hasil yang telah kami dapatkan dalam kerjasama dengan pemerintah itu saja dek”. (Hasil wawancara dengan FD pada tanggal 23 November 2018)

Adapun hasil wawancara diatas senadah dengan informan TS staf PT.ISS

yang mengatakan bahwa:

“kalau masalah kompensasi dek saya biasa kurang tau, tapi saya pernah mengikuti rapat dengan pimpinan yang membahas tentang kompensasi yang harus diberikan pemerintah dalam pencapaian yang didapat dari pihak kami itu semua sudah di dari awal dari kerjasama dan Sk kontrak juga itu sudah ada”. (Hasil wawancara dengan TS pada tanggal 23 November 2018)

Adapun hawawancara yang senada dengan informan MD staf kepegawaian PT.ISS yang mengatakan bahwa:

“aduh dek kalau masalah kompensasi saya tidak bisa kasih tau informasi banyak karna itu rahasia dari perusahaan kami, tapi dari pihak kantor kami biasa memberikan kompensasi dari pemerinta dimana beberpaa persen dari pendapatan dari hasil kerjasama kami dan pemerintah kami kasih oleh pemerintah atau kantor PD.Parkir Makassar Raya itu hanya bentuk suatu dimana memberikan suatu motivasi yang baik terhadap karyawan-karyawan maumi kami”. (Hasil wawancara dengan MD pada tanggal 23 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas maka dapat saya simpulkan bahwa dalam pemerian kompensasi itu sudah seharusnya diperinkan karna dimana setiap kerjasama pasti ada suatu timbal balik atau tanda keberhasilan atas meningkatnya pendapatan yang sebelumnya

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya bahwa penelitian berfokus pada Analisis Public Private Partnership (P3) dalam implementasi kebijakan perparkiran di Kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kerja sama antara PD.Parkir Kota Makassar dengan PT.ISS Cabang makassar kurang memuaskan karena perusahaan swasta (PT.ISS) sangat tertutup terhadap karyawan maupun masyarakat namun perusahaan pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) sangat *welcome* terhadap pelayanan yang diberikan terhadap masyarakat
- 2) setiap pemberian kompensasi dalam setiap kerjasama itu sudah harusnya dibicarakan dalam suatu bentuk kontak kerjasama dari awal agar masing-masing pimpinan dapat memberikan motivasi setiap karyawan dalam bekerja untuk mencapai tujuan yang baik.dan yang dimana pemerintah yang menerima kompensasi dari pihak swasta dan sudah disepakati bersama.
- 3) dalam menerima resiko itu biasanya PD.parkir yang dapatkan kompelen dari masyarakat pada dasarnya yang harus bertanggung jawab adalah pt.iss bahwa resiko yang diterima oleh pihak swasta ternyata yang dapat adalah pihak pemerintah (PD.Parkir Makassar Raya) maka dala pengambilan keputusan yang ada dilapangan dan dapat mengatasi resiko tersebut dengan baik dan di rapatkan dengan sesuai kontrak kerjasama.

- 4) Dalam penyediaan fasilitas dimana pihak swasta telah menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung perparkiran di kota makassar yang memberikan fasilitas lahan perparkiran disetiap titik yang telah ditetapkan oleh pihak pemerintah dan pihak swasta

B. SARAN

1. Untuk lebih meningkatkan sumberdaya dalam menjalankan fungsi-fungsi perparkiran di Kota makassar
2. Pihak swasta harus sepenuhnya bertanggung jawab atas resiko dalam kerjasama oleh pemerintah



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Chris Skelcher. 2014. *Public Private Partnership and Hibridity*. AUS. S.Osborne, *Public Private Partnership, Theory Practicel International Perspectiv*. Edite By: Stephen. 2002.

Crus Dkk. 2013. *Innovative Public-Private, Partnerships For Inclusive*.

Noto Atmodjo dan Soekidjo. 2006. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ke 2: Renaka.Cipta Jakarta.

Jurnal :

Setiawan Tomi, *Old Public Administration (OPA) di Indonesia (1)*. Jurnal. Padjajdaran University. Diakses pada 10 Agustus 2018 Pukul 21.29 WITA. 2018.

Mahsyar, Abdul. *Public Private Partnership: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta Dalam Pengelolaan Asset Publik di Kota Makassar*. Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin. Di Akses Pada 08 Agustus 2018 Pukul 19.34 WITA. 2018.

Kasmad, Rulinawaty. *Democracy and Efficiency: An Analysis Of City Transportation Service Delivery Network*. Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin. Di Akses Pada 01 September 2018 Pukul 11.12 WITA. 2018.

Kasmad, Rulinawaty. *Discetion Dilemma of Street-Level Bureaucracy in Implementation of Street Vendors Empowement Policy in Makassar City,indonesia*. Jurnal. Makassar: Universitas Hasanuddin. Di Akses pada 01 September 2018 Pukul 12.31 WITA.2018

B. Lain-Lain :

<https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-are-the-different-models-for-public-private-partnership-ppp-in-infrastructure/>

<http://asyqarprabowo.blogspot.com/2015/12/perencanaan-bisnis-yang-berhasil.html>

https://www.researchgate.net/publication/319298618_GOOD_GOVERNANCE_TATA_KELOLA_PEMERINTAHAN_YANG_BAIK_DALAM_PEMBERIAN_IZIN_OLEH_PEMERINTAH_DAERAH_DI_BIDANG_PERTAMBANGAN
[accessed Aug 09 2018].

<http://www.galeripustaka.com/2013/05/pengertian-cara-dan-jenis-parkir.html>

L

A

M

P

I

R

A

N





Saat melakukan wawancara dengan bagian Humas PD.Parkir Makassar Raya pada tgl 23 November 2018



Saat melakukan wawancara dengan kepala bagaian umum PD. Parkir Makassar Raya pada tgl 23 November 2018



Saat melakukan wawancara dengan kepala Pengelolaan PD.Parkir Makassar Raya pada tgl 6 Desember 2018





Saat melakukan wawancara dengan pegawai PT.ISS pada tgl 24 November 2018



Saat melakukan wawancara dengan pegawai PT.ISS pada tgl 24 November 2018



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 1671/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M
Lamp. : 1 (satu) Eksamplar
Hal : **Pengantar Penelitian**

Kepada Yth.
Bapak Rektor, Cq. Lembaga Penelitian dan
Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :

Nama Mahasiswa : Herawati
St a m b u k : 10561 04894 14
J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara
Lokasi Penelitian : Di Kota Makassar
Judul Skripsi : **“Analisis Publik Pripate Partnership (P3) dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar”**

Demikian Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih.

Jazakumullahu Khaeran Katziraa.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 12 Oktober 2018

D e k a n,
Ub. Wakil Dekan I


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT-

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 E-mail :lp3munismuh@plasa.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

: 76/Izn-5/C.4-VIII/X/37/2018

: 1 (satu) Rangkap Proposal

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMD Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1671/FSP/A.1-VIII/X/1439 H/2018 M tanggal 12 Oktober 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **HERAWATI**
No. Stambuk : **10561 04894 14**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Publik Private Partnership (P3) dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 Oktober 2018 s/d 13 Desember 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus Tamalatea : Jl. Sultan Alauddin Km. 7 Makassar 90221
Telp. 0411 - 866972 Ps. 25 Faks. (0411) 865588

SURAT KETERANGAN
HASIL PERBAIKAN UJIAN HASIL PENELITIAN
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Nama : Herawati
Nomor Stambuk : 10561 04894 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Penelitian : Analisis Publik Pripate Partnership (P3) dalam Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar

NO	Nama Tim Penilai	Disetujui Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)	20/2-2019	
2	Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, S.Sos, M.Si	19/02/19	
3	Adnan Ma'ruf, S.Sos, M.Si	20-02-2019	
4	Nurbiah Tahir, S.Sos, M.AP	19/02/19	

Makassar, 2018
Mengetahui :
Wakil Dekan I

Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867
Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 22 Oktober 2018

Kepada

Nomor : 070 / 4557 -II/BKBP/XI/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. DIR. PD. PARKIR MAKASSAR RAYA

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 7729/S.01P/PTSP/2018 Tanggal 16 Oktober 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : HERAWATI
Nim/Jurusan : 10561 04894 / Ilum.Adm.Negara
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / UNISMUH
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 259 , Makassar
Judul : "ANALISIS PUBLIK PRIVATE PARTNERSHIP (P3) DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPARKIRAN DI KOTA MAKASSAR "

Bermaksud mengadakan *Penelitian* pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka *Penyusunan Skripsi* sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Oktober s/d 16 Desember 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n. WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
U6. KABID HUBUNGAN AMTAR LEMBAGA



Drs. IRIANS JAH B. PAWELLERI, M.AP

Pangkat : Pembina

NIP. : 19621110 198603 1 042

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;